

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, masyarakat global dapat menjadi saling ketergantungan. Dunia mulai berubah secara struktural menuju era globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi era globalisasi, kualitas pendidikan tidak boleh diabaikan.

Saat ini, program pendidikan nasional memprioritaskan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bisa disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya mata pelajaran PPKn, guru harus terus meningkatkan diri dalam pengetahuan dan pengelolaan proses belajar mengajar. Tujuannya adalah agar siswa dapat mempelajari PPKn dengan baik dan benar sehingga mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. "Sebagai fasilitator, guru

berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran", kata Pratama (2016: 88).

Pembelajaran di kelas sering mengalami tantangan, yang menuntut guru untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Cholid (2015: 35). Karena guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membantu dan membimbing siswa, keberhasilan guru dalam mengajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk melaksanakan proses belajar mengajar sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar dan meningkatkan hasil belajar mereka.

Menurut peneliti, pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah tentang bagaimana seorang warga negara dapat memahami dan memanfaatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Lickona (2019: 6) "pendidikan memiliki dua tujuan yang besar yaitu membentuk anak-anak menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik." Ini menunjukkan bahwa, dengan tujuan melahirkan orang yang cerdas dan berpengetahuan tinggi, pendidikan berfungsi sebagai sarana strategis untuk membangun keterampilan masyarakat.

Guru, keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mendidik siswa menjadi orang yang baik, terutama melalui bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah saat ini berusaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mendidik mereka. agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan (civil intelligence) intelektual, emosional, sosial, dan spiritual,

memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civil responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, program pengajaran PKn mencakup aspek afektif dan psikomotor, bukan hanya kognitif.

Selain komponen tersebut, PKn mengembangkan pendidikan nilai. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, "pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia." "Implikasi PKn yang identik dengan pendidikan budi pekerti merupakan cakupan kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan mampu mewujudkan upaya pembentukan warga negara yang baik (good citizen)" (Hasibuan, 2021: 450).

Dalam PKn paradigma baru terdapat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), serta karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mampu mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan (Anbiya, 2020: 302).

Menurut paradigma tersebut bisa disimpulkan bahwa pembentukan karakter didasarkan pada pengembangan komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civil knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civil skill*). "Keterampilan kewarganegaraan (*civil skill*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan

dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara" (Pasaribu, 2022).

“Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengemukakan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik (Mulyoto et al., 2020: 26).”

Pendapat ini menunjukkan bahwa mengemukakan pendapat adalah salah satu sifat kewarganegaraan. Sangat penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan bertanya dan mengajukan pertanyaan karena dengan melakukan ini, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran dan apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajarinya. Ketika siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mereka terlihat pasif. Ini adalah bukti rendahnya kemampuan berpendapat mereka. Tentu saja, pembelajaran dengan komunikasi satu arah tidak menyenangkan.

Di sekolah, upaya guru untuk membantu siswa memperoleh keterampilan kewarganegaraan membuat siswa memiliki masa depan yang luar biasa. Siswa adalah makhluk sosial yang diharapkan keberadaannya oleh lingkungan mereka, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan tempat mereka tinggal. Mengingat "pentingnya partisipasi, pengetahuan, sikap, dan terlibat aktif dalam pembelajaran di sekolah maka pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic skill) harus dilakukan secara efektif, tentu saja ini merupakan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan" (Alfiansyah dan Wangid, 2018: 189).

Selain itu, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan (PKn) bergantung pada upaya guru. Pada dasarnya, guru PKn adalah bagian manusiawi dari proses belajar mengajar dan berkontribusi pada proses pembentukan sumber daya manusia. Sebenarnya, guru memiliki peran yang unik dan sangat kompleks dalam keterlibatan belajar mengajar. Mereka berusaha untuk mengantar siswa atau anak didik ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, rencana kegiatan guru harus disusun dan dibenarkan hanya untuk kepentingan siswa dan sesuai dengan tanggung jawab dan profesi guru.

Di sekolah, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku kritis dan menjawab masalah globalisasi yang memengaruhi negara dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk keberlangsungan negara, jadi penting bagi negara untuk terlibat aktif dalam mempertahankannya. Dengan memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum, keterlibatan ini dapat dicapai. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah untuk mempersiapkan generasi penerus untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi yang ada di negara tersebut. Siswa harus mendapatkan pemahaman tentang bagaimana identitas budaya regional, nasional, dan global saling terkait dan berkembang. Sekolah harus melakukan ini.

Siswa harus didorong untuk memeriksa identifikasi mereka secara kritis dan berkomitmen untuk memahami cara-cara kompleks di mana siswa saling berhubungan dalam hidup. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan membantu siswa dalam membangun identitas kemanusiaan mereka. Siswa

harus diberi pemahaman tentang hubungan antara budaya, negara, dan dunia melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan dengan benar dan semua siswa dapat menerimanya.

Pendidikan kewarganegaraan harus dipermudah. Ditakutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang salah akan membentuk generasi yang egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak menghargai keberagaman. Selain itu, program pendidikan kewarganegaraan dapat berdampak negatif. Kursi pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman tentang sikap kewarganegaraan secara tidak sadar. Jika kurikulum ini dijalankan dengan tidak berhati-hati, generasi berikutnya akan terbelah karena siswa akan salah memahami konten yang memiliki nilai.

Untuk menghadapi kemajuan zaman, pendidikan kewarganegaraan harus dapat membangun keterampilan kewarganegaraan. Diharapkan bahwa keahlian kewarganegaraan akan menghasilkan warga negara yang terlibat aktif dalam organisasi negara. Banyak kekacauan, kekacauan, bahkan tawuran antara kelompok menunjukkan ketidakpahaman akan pentingnya konsep pendidikan kewarganegaraan. Ketika orang yang terlibat tidak memiliki kemampuan sipil yang baik, masalah ini muncul. Problemnnya berasal dari kurangnya pemahaman akan pentingnya konsep bernegara.

Menurut observasi dan wawancara awal yang dilakukan dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Islam Al-Kamal Bojongmangu Bekasi, meningkatkan kemampuan civic siswa adalah cara tercepat untuk meningkatkan kecerdasan mereka, terutama dalam hal pemahaman materi

Pendidikan Kewarganegaraan. Diharapkan bahwa pelajaran ini akan menarik minat siswa dengan membahas topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Siswa tidak hanya berpartisipasi dalam pembelajaran, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami, berusaha keras untuk menjawab pertanyaan guru dan berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab antara siswa.

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar siswa mengatakan bahwa siswa di SMA Islam Al-Kamal Bojongmangu Bekasi memiliki keterampilan kewarganegaraan dan partisipasi yang rendah. Menurut guru, ini disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam membaca dan berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab. Mereka juga tidak memiliki minat yang cukup untuk berpartisipasi dalam diskusi.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, para guru di SMA Islam Al-Kamal Bojongmangu Bekasi telah melakukan upaya untuk meningkatkan civic skill siswa dengan selalu berusaha memberikan semangat kepada siswa melalui keterampilan yang dimilikinya dan dengan berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Berpartisipasi aktif dengan teman sekelas siswa dalam suasana terbatas. Situasi atau kegiatan yang berlangsung selama pembelajaran dapat memberikan gambaran sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan kerjasama siswa hendaknya terlihat dari dukungan siswa dalam pengalaman pendidikan Diklat KewSarganegaraan sehari-hari, misalnya siswa yang ikut, terlibat dan ikut serta dalam pertemuan

perbincangan, dengan harapan tercapainya tujuan pertemuan, siswa yang terlihat mengambil Minat juga pasti menimbulkan pertanyaan terhadap materi yang tidak dipahami dengan jelas oleh pendidik.

Siswa tidak mau memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain berdasarkan wawasan yang siswa ketahui sebelumnya, menjawab pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain. Oleh karena itu upaya guru dalam mengembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraan (*Civic skill*) yang dimiliki oleh siswa sangat penting untuk membentuk warga negara yang ideal. Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka peneliti tertarik unruk mengangkat judul **“Upaya Guru PPKn Dalam Membina Civic Skill Siswa SMAI Al-Kamal.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya upaya guru dalam memahami kepribadian siswa.
2. Lingkungan sekolah kurang kondusif membuat minat belajar siswa kurang optimal
3. Adanya kendala yang dihadapi guru dalam membina civic skill siswa
4. Civic skill dalam pembelajaran PPKn hanya sebatas materi di dalam kelas.
5. Keterampilan berinteraksi siswa kurang, dapat dilihat dari partisipasi siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehari-hari.
6. Siswa kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Saja Upaya Guru PPKn dalam Membina *Civic Skill* Siswa Di SMA Islam Al-Kamal?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Guru Ppkn dalam Membina *Civic Skill* Siswa Di SMA Islam Al-Kamal?
3. Apa Saja Solusi Untuk Mengatasi Kendala Guru Ppkn dalam Membina *Civic Skill* Siswa Di SMA Islam Al-Kamal?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya guru PPKn dalam membina civic skill siswa di SMA Islam Al-Kamal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat guru PPKn dalam membina civic skill Siswa SMA Islam Al-Kamal.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala guru PPKn dalam membina civic skill di SMA Islam Al-Kamal.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka atau acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang upaya guru PPKn dalam membina *civic skill* siswa di sekolah SMAI Al-Kamal.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan mengenai upaya guru PPKn dalam membina *civic skill* siswa di sekolah SMAI Al-Kamal.

2. Manfaat Secara Praktik

a. Bagi Sekolah

Sebagai input bagi kepala sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan motivasi guru dalam mendidik atau membimbing siswa agar lebih baik.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian diharapkan guru dapat mengembangkan *civic skill* siswa di sekolah SMAI Al-Kamal.

c. Bagi Siswa

Kepada siswa diharapkan bisa menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai nilai-nilai norma sehingga membentuk siswa yang lebih baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa yaitu upaya guru PPKn dalam membina *civic skill* siswa.